



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GEDE SUYASA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **57329**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.589.125.000

1. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/53 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1325 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 139.125.000
4. Tanah Seluas 4100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.000.000

1. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T / SPD MOTR SOLO 001 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED 1,5 E A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.250.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.489.607

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.829.864.607



III. HUTANG

Rp. 1.347.219.251

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.482.645.356

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.